

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(AUDITED)**

Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



**Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian**  
Jl. Tentara Pelajar No. 12,  
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor, 16114  
Tahun Anggaran 2021  
Jl. Tentara Pelajar No. 12 Bogor

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bogor, 31 Desember 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Husnain. MP., M.Sc.  
NIP. 197309102001122001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
  - A. Penjelasan Umum
  - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
    - B.2. Belanja
    - B.3. Belanja Pegawai
    - B.4. Belanja Barang
    - B.5. Belanja Modal
      - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
    - C.1. Aset Lancar
      - C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas
      - C.1.2. Persediaan
    - C.2. Aset Tetap
      - C.2.1. Tanah
      - C.2.2. Peralatan dan Mesin
      - C.2.3. Gedung dan Bangunan
      - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
      - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
    - C.3. Piutang Jangka Panjang
    - C.4. Aset Lainnya
      - C.4.1. Aset Tak Berwujud
      - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
    - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
    - C.6. Ekuitas
      - C.6.1. Ekuitas
  - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
    - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
    - D.2. Beban Pegawai
    - D.3. Beban Persediaan
    - D.4. Beban Barang dan Jasa
    - D.5. Beban Pemeliharaan
    - D.6. Beban Perjalanan Dinas
    - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    - D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
  - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
    - E.1. Ekuitas Awal
    - E.2. Surplus/Defisit-LO
    - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.4. Transaksi Antar Entitas
      - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

- E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
    - E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, 31 Desember 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Husnain. MP., M.Sc.  
NIP. 197309102001122001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.545.552.518,00 atau mencapai 178,72% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.305.251.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.45.528.101.159,00 atau mencapai 97,53% dari alokasi anggaran sebesar Rp.46.681.527.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.60.476.176.780,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.434.546.573,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp.35.326.007.150,00 Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp.0,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.24.715.623.057,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.60.476.176.780,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.545.552.011,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.50.898.493.145,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -50.352.941.134,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.5.035.595.157,00 dan Defisit Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-45.317.345.977,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.60.667.904.101,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-45.317.345.977,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.45.125.618.656,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.60.476.176.780,00.

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI BESAR SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	305.251.000,00	545.552.518,00	178,72	638.067.302,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>305.251.000,00</b>	<b>545.552.518,00</b>	<b>178,72</b>	<b>638.067.302,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	5.925.500.000,00	5.689.875.031,00	96,02	5.667.434.213,00
Belanja Barang	B.4.	39.857.640.000,00	38.967.911.225,00	97,77	16.790.777.161,00
Belanja Modal	B.5.	898.387.000,00	870.314.903,00	96,88	655.462.750,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>46.681.527.000,00</b>	<b>45.528.101.159,00</b>	<b>97,53</b>	<b>23.113.674.124,00</b>

## II. NERACA

**BALAI BESAR SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	432.509.268,00	422.705.703,00
Persediaan	C.1.2.	2.037.305,00	1.357.900,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>434.546.573,00</b>	<b>424.063.603,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	13.152.236.000,00	13.152.236.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	26.922.909.364,00	25.410.995.664,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	19.912.199.153,00	19.305.987.250,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	958.580.000,00	958.580.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	337.857.500,00	337.857.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-25.957.774.867,00	-23.639.374.974,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>35.326.007.150,00</b>	<b>35.526.281.440,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	27.731.174.093,00	27.731.174.093,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-3.015.551.036,00	-3.013.615.035,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>24.715.623.057,00</b>	<b>24.717.559.058,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>60.476.176.780,00</b>	<b>60.667.904.101,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	60.476.176.780,00	60.667.904.101,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>60.476.176.780,00</b>	<b>60.667.904.101,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>60.476.176.780,00</b>	<b>60.667.904.101,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	545.552.011,00	532.889.602,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>545.552.011,00</b>	<b>532.889.602,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	5.689.875.031,00	5.667.434.213,00
Beban Persediaan	D.3.	14.938.317.039,00	6.326.158.650,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	12.517.132.991,00	6.034.068.482,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.417.903.324,00	1.981.926.859,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	9.093.878.466,00	2.516.370.670,00
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	D.7.	3.974.126.950,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.267.259.344,00	2.762.958.390,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>50.898.493.145,00</b>	<b>25.288.917.264,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-50.352.941.134,00</b>	<b>-24.756.027.662,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	5.035.595.157,00	218.044.700,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	46.949.700,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>5.035.595.157,00</b>	<b>171.095.000,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-45.317.345.977,00</b>	<b>-24.584.932.662,00</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	60.667.904.101,00	76.509.767.403,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-45.317.345.977,00	-24.584.932.662,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	45.125.618.656,00	8.743.069.360,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-191.727.321,00	-15.841.863.302,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>60.476.176.780,00</b>	<b>60.667.904.101,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian

Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; (b) pelaksanaan pemetaan dan evaluasi sumberdaya lahan serta pengembangan wilayah, (c) pelaksanaan analisis dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian, (d) pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem usaha pertanian bidang sumberdaya lahan pertanian, (e) pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; (f) pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, dan (g) pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan perlengkapan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 157/Kpts/OT.160/J/7/2006 tanggal 10 Juli 2006, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian juga diberi tugas untuk mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Tanah, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, dan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian bertujuan untuk mendukung program Badan Litbang Pertanian terkait dengan empat sukses pembangunan pertanian. Melalui peranan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian diharapkan dapat fokus kepada:

#### 1. Dukungan terhadap program intensifikasi sumberdaya lahan eksisting produktif:

- a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan, baik pupuk organik, an-organik, hayati dan pembenah tanah, pemulihan lahan serta teknologi inovasi pengelolaan air dan iklim.
- b. Memprioritaskan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi tanah dan pemupukan, efisiensi air dan kesesuaian iklim untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan.

#### 2. Dukungan terhadap upaya optimalisasi sumberdaya lahan terlantar dan terdegradasi (bongkor, lahan tidur) dan lahan sawah bukaan baru:

- a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi pengelolaan lahan, reklamasi, pemupukan dan pengelolaan air untuk perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan.
- b. Menyediakan informasi potensi dan karakteristik sumberdaya lahan terlantar, terdegradasi dan sawah bukaan baru.
- c. Memprioritaskan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi tanah dan pemupukan, efisiensi air dan kesesuaian iklim untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan terlantar, terdegradasi dan sawah bukaan baru.

#### 3. Untuk mewujudkan tujuan BBSDLP berkomitmen dengan visi :

“Menjadi lembaga litbang penyedia informasi dan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian berkelas dunia untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan”.

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai kantor BBSDLP yaitu meliputi :

1. Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.
2. Terselenggaranya diseminasi inovasi teknologi sumberdaya lahan pertanian.

### 2. Langkah-Langkah Strategis

1. Pendekatan penelitian dimulai dengan menetapkan luaran yang akan dihasilkan (*output oriented*). Luaran yang dihasilkan harus mempunyai nilai tambah ilmiah dan komersial, dihasilkan dalam waktu singkat serta dapat dimanfaatkan oleh pengguna.
2. Menyempurnakan manajemen penelitian dari mulai perencanaan sampai mencapai hasil penelitian yang akuntabel dan *good governance*.
3. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan lembaga penelitian, dunia usaha dan mitra kerja lainnya perlu dilakukan dalam rangka menggali dan meningkatkan dana penelitian; pengakuan ilmiah internasional (*scientific recognition*).
4. Mempercepat dan meningkatkan diseminasi, promosi serta penjangkauan umpan balik inovasi teknologi dan kebijakan sumberdaya lahan dalam rangka meningkatkan manfaat dan dampak inovasi teknologi yang dihasilkan.
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumberdaya penelitian melalui pelatihan SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan struktur penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi litbang sumberdaya lahan yang berkelas dunia.
6. Mendorong inovasi teknologi yang mengarah pada pengakuan dan perlindungan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara nasional dan internasional.

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan program, kegiatan utama beserta target output dalam upaya pencapaian sasaran pada TA 2021.

Seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan di BBSDLP beserta balai-balai yang dikoordinasikannya merupakan dukungan terhadap Program Riset dan Inovasi Penelitian dan Teknologi Penelitian. Kegiatan utama yang telah ditetapkan adalah Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan di BBSDLP beserta balai-balai yang dikoordinasikannya merupakan dukungan terhadap Program Riset dan Inovasi Penelitian dan Teknologi Penelitian. Kegiatan utama yang telah ditetapkan adalah Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian.

1. Penelitian dan pengembangan sumber daya sistem pertanian, keluaran output (a) Peta Sumberdaya Lahan Pertanian 52 Peta, (b) Teknologi Sumberdaya Lahan Pertanian 11 Teknologi, (c) Desiminasi Litbang hasil Sumber Pertanian 3 teknologi, (d) kerja sama litbang Pertanian 1 teknologi.
2. Program Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Dukungan Manajemen mendukung program Litbang Pertanian, Keluaran Aoutput, (a). Rekomodasi kebijakan Pertanian 4 Rekomodasi Pertanian, (b), Layanan Perkantoran Sumberdaya Lahan Pertanian 1 Layanan, (c), Layanan Perencanaan Penganggaran Internal 1 Layanan, (d) Layanan Umum, Layanan Pengelolaan Keuangan 1 Layanan, (e) Layanan sarana Internal, Peralatan Fasilitas Perkantoran Sumber daya Lahan 1 Unit, (f) Layanan Fasilitas Internal, Gedung kantor Sumber daya Lahan 1 Unit, (g) Layanan SDM, Layanan Manajemen SDM Sumber daya Lahan 69 Orang, (h) Layanan Monitoring dan Evaluasi internal, 1 Laporan.

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
  - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
  - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
  - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (nett realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.250.000,00	7.250.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	272.621.000,00	272.621.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	25.380.000,00	25.380.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>305.251.000,00</b>	<b>305.251.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.928.900.000,00	5.907.500.000,00
Belanja Lembur	96.600.000,00	18.000.000,00
Belanja Barang Operasional	2.844.180.000,00	3.562.880.000,00
Belanja Barang Non Operasional	11.334.120.000,00	6.397.161.000,00
Belanja Barang Persediaan	13.746.676.000,00	115.497.921.000,00
Belanja Jasa	3.940.020.000,00	3.306.821.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.787.320.000,00	1.969.440.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.648.000.000,00	9.123.417.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.000.000,00	595.387.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.620.000,00	303.000.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.737.436.000,00</b>	<b>46.681.527.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.545.552.518,00 atau mencapai 178,72% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.305.251.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.250.000,00	8.362.000,00	115,34
Pendapatan Jasa Lainnya	25.380.000,00	28.755.000,00	113,30
Pendapatan Lain-Lain	0,00	518,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	272.621.000,00	508.435.000,00	186,50
<b>Jumlah</b>	<b>305.251.000,00</b>	<b>545.552.518,00</b>	<b>178,72</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -14,50% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	380.173,00	- 100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.362.000,00	11.637.000,00	-28,14
Pendapatan Jasa Lainnya	28.755.000,00	40.275.000,00	-28,60
Pendapatan Lain-Lain	518,00	105.177.829,00	- 100,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	508.435.000,00	480.597.300,00	5,79
<b>Jumlah</b>	<b>545.552.518,00</b>	<b>638.067.302,00</b>	<b>-14,50</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp.45.528.101.159,00 atau 97,53% dari anggaran belanja sebesar Rp.46.681.527.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	5.925.500.000,00	5.701.055.599,00	96,21
Belanja Barang	39.857.640.000,00	38.967.911.225,00	97,77

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Modal	898.387.000,00	870.314.903,00	96,88
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>46.681.527.000,00</b>	<b>45.539.281.727,00</b>	<b>97,55</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-11.180.568,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>46.681.527.000,00</b>	<b>45.528.101.159,00</b>	<b>97,53</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 96,97% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Ada perubahan pemotongan anggaran dan penambahan anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan proses perencanaan yang dilaksanakan sehingga terjadi beberapa perubahan perencanaan yang harus di sesuaikan dengan keadaan Anggaran Satuan Kerja Balai Sumberdaya Lahan Pertanian.

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	5.689.875.031,00	5.667.434.213,00	0,40
Belanja Barang	38.967.911.225,00	16.790.777.161,00	132,08
Belanja Modal	870.314.903,00	655.462.750,00	32,78
<b>Total Belanja</b>	<b>45.528.101.159,00</b>	<b>23.113.674.124,00</b>	<b>96,97</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.689.875.031,00 dan Rp.5.667.434.213,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,40% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terhambatnya beberapa kegiatan kepegawaian dan beberapa Pegawai mengalami Pensiun tahun 2021
2. Proses keadaan terjadinya pengurangan dan Penambahan Anggaran untuk tahun 2021

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.687.173.599,00	5.586.957.880,00	1,79
Belanja Lembur	13.882.000,00	82.142.000,00	-83,10
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.701.055.599,00</b>	<b>5.669.099.880,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-11.180.568,00</b>	<b>-1.665.667,00</b>	<b>571,24</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.689.875.031,00</b>	<b>5.667.434.213,00</b>	<b>0,40</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.38.967.911.225,00 dan Rp.16.790.777.161,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 132,08% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kegiatan Pelaksana Kegiatan yang berkurang dan situasi Covid 19 dan Pengurangan Anggaran 2021
2. Terjadinya pengurangan anggaran dan kenaikan anggaran secara dadakan dan ketidakjelasan proses penambahan dan pengurangan dengan proses kegiatan yang baru untuk tahun 2021

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.522.616.255,00	3.205.971.696,00	9,88
Belanja Barang Non Operasional	6.186.291.365,00	1.533.370.886,00	303,44
Belanja Barang Persediaan	15.390.358.920,00	6.296.966.650,00	144,41
Belanja Jasa	2.808.225.371,00	1.294.725.900,00	116,90
Belanja Pemeliharaan	1.966.540.848,00	1.943.371.359,00	1,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.093.878.466,00	2.516.370.670,00	261,39
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>38.967.911.225,00</b>	<b>16.790.777.161,00</b>	<b>132,08</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>38.967.911.225,00</b>	<b>16.790.777.161,00</b>	<b>132,08</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.870.314.903,00 dan Rp.655.462.750,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,78% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Berkurangnya Kegiatan untuk Belanja Modal 2021 sehingga realisasi berkurang di tahun 2021

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.911.000,00	435.291.000,00	35,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.403.903,00	220.171.750,00	27,36
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>870.314.903,00</b>	<b>655.462.750,00</b>	<b>32,78</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>870.314.903,00</b>	<b>655.462.750,00</b>	<b>32,78</b>

#### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.589.911.000,00 dan Rp.435.291.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 35,52% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Karena adanya penambahan Gedung Kantor untuk kegiatan Kantor tahun berjalan 2021

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.911.000,00	435.291.000,00	35,52
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>589.911.000,00</b>	<b>435.291.000,00</b>	<b>35,52</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>589.911.000,00</b>	<b>435.291.000,00</b>	<b>35,52</b>

#### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.280.403.903,00 dan Rp.220.171.750,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,36% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

2. Karena adanya penambahan Bangunan Gedung Kantor Tahun 2021 berupa selasar penghubung antar gedung

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.403.903,00	220.171.750,00	27,36
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>280.403.903,00</b>	<b>220.171.750,00</b>	<b>27,36</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>280.403.903,00</b>	<b>220.171.750,00</b>	<b>27,36</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

**C.1. ASET LANCAR**

**C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.432.509.268,00 dan Rp.422.705.703,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
Saldo Kas di Neraca Merupakan Kegiatan Hibah	432.509.268,00
<b>Jumlah</b>	<b>432.509.268,00</b>

**C.1.2. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.037.305,00 dan Rp.1.357.900,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	2.037.305,00	1.357.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.037.305,00</b>	<b>1.357.900,00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.13.152.236.000,00 dan Rp.13.152.236.000,00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.26.922.909.364,00 dan Rp25.410.995.664,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>25.410.995.664,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	589.911.000,00
Transfer Masuk	186.343.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>26.922.909.364,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-22.8884.750.258,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>4.038.159.106,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Terjadinya mutasi penambahan adanya pembelian dan Transfer Masuk sehingga terjadi penambahan Nilai Perolehan

Sementara mutasi pengurangan terjadinya Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.19.586.391.153,00 dan Rp.19.305.987.250,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>19.305.987.250,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Melalui KDP	280.403.903,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>19.912.199.153,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-2.513.946.366,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>17.398.252.787,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Terjadinya mutasi penambahan transaksi hasil pengembangan konstruksi dalam pengembangan dan saldo Perolehan bertambah

Terjadi Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 sehingga terjadinya Pengurangan Nilai Buku Sampai Per 31 Desember 2021

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.958.580.000,00 dan Rp.958.580.000,00.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.337.857.500,00 dan Rp.337.857.500,00.

#### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-25.957.774.867,00 dan Rp.-23.639.374.974,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	26.922.909.364,00	-22.884.750.258,00	4.038.159.106,00
2.	Gedung dan Bangunan	19.912.199.153,00	-2.513.946.366,00	17.398.252.787,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	958.580.000,00	-559.078.243,00	399.501.757,00
4.	Aset Tetap Lainnya	337.857.500,00	0,00	337.857.500,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>48.131.546.017,00</b>	<b>-25.957.774.867,00</b>	<b>22.173.771.150,00</b>

### C.4. ASET LAINNYA

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.27.731.174.093,00 dan Rp.27.731.174.093,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	2.720.000,00
Hak Cipta	5.175.000,00
Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864,00
Software	3.012.687.229,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.731.174.093,00</b>

#### C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.015.551.036,00 dan Rp.-3.013.615.035,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	27.731.174.093,00	-3.015.551.036,00	27.728.862.093,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>27.731.174.093,00</b>	<b>-3.015.551.036,00</b>	<b>24.715.623.057,00</b>

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.60.476.176.780,00 dan Rp.60.667.904.101,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.545.552.011,00 dan Rp.532.889.602,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	28.755.000,00	40.275.000,00	-28,60
Pendapatan Anggaran Lain-lain	11,00	129,00	-91,47
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	508.435.000,00	480.597.300,00	5,79
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	380.173,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	1.225.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	6.300.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.362.000,00	4.112.000,00	103,36
<b>Jumlah</b>	<b>545.552.011,00</b>	<b>532.889.602,00</b>	<b>2,38</b>

Terjadi penambahan pendapatan Bukan Pajak lainnya terutama kegiatan pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan kenaikan 5,79 dan sewa tanah dan Gedung dan bangunan sampai mencapai 103,36 selama tahun 2021.

Terdapat perbedaan total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Pendapatan Anggaran sebesar 507,00 yang merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.689.875.031,00 dan Rp.5.667.434.213,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.561.255.600,00	3.602.909.020,00	-1,16
Beban Pembulatan Gaji PNS	50.829,00	44.755,00	13,57
Beban Tunj. Anak PNS	59.684.226,00	60.534.392,00	-1,40
Beban Tunj. Beras PNS	179.746.440,00	148.678.260,00	20,90
Beban Tunj. Fungsional PNS	956.878.000,00	743.684.900,00	28,67
Beban Tunj. PPh PNS	74.009.068,00	58.934.580,00	25,58
Beban Tunj. Struktural PNS	50.850.000,00	112.405.000,00	-54,76
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	278.523.268,00	276.699.306,00	0,66
Beban Tunjangan Umum PNS	77.530.000,00	70.880.000,00	9,38
Beban Uang Lembur	13.882.000,00	82.142.000,00	-83,10
Beban Uang Makan PNS	437.465.600,00	510.522.000,00	-14,31
<b>Jumlah</b>	<b>5.689.875.031,00</b>	<b>5.667.434.213,00</b>	<b>0,40</b>

Terjadinya penambahan sebesar 0,40 adanya tunjangan fungsional dan penambahan pegawai PNS dari CPNS satuan kerja Balai Besar Litbang Pertanian.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.14.938.317.039,00 dan Rp.6.326.158.650,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	2.495.587.340,00	132.561.500,00	1.782,59
Beban Persediaan konsumsi	10.519.549.959,00	5.651.633.150,00	86,13
Beban persediaan lainnya	1.923.179.740,00	541.964.000,00	254,85
<b>Jumlah</b>	<b>14.938.317.039,00</b>	<b>6.326.158.650,00</b>	<b>136,14</b>

Perbandingan Beban Persediaan Balai Besar Sumberdaya Lahan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan terjadinya penambahan anggaran dan penambahan kegiatan merupakan beban konsumsi atas barang-barang yang habis pakai merupakan hasil produksi baik yang di pasarkan maupun tidak di pasarkan untuk mendukung kegiatan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian.

Beban Persediaan pada Laporan Operasional senilai Rp. 14.938.317.039,- tidak sama dengan Transaksi Pemakaian yang tercantum dalam aplikasi Laporan Persediaan sebesar Rp. 15.389.679.515,- hal tersebut dikarenakan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp. 154.057.640,- dan beban Persediaan suku cadang senilai Rp. 297.304.836,- tidak masuk dalam LO

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.12.517.132.991,00 dan Rp.6.034.068.482,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	233.381.300,00	466.681.900,00	-49,99
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.756.690.079,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.022.701.986,00	351.948.986,00	190,58
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	898.591.546,00	579.665.821,00	55,02
Beban Barang Operasional Lainnya	62.260.000,00	64.643.200,00	-3,69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170.076.000,00	185.340.000,00	-8,24
Beban Honor Output Kegiatan	173.518.000,00	714.740.000,00	-75,72
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.839.022.437,00	360.390.000,00	410,29
Beban Jasa Konsultan	39.370.000,00	19.470.000,00	102,21
Beban Jasa Profesi	89.000.000,00	204.350.000,00	-56,45
Beban Keperluan Perkantoran	2.387.375.709,00	2.369.122.675,00	0,77
Beban Langganan Air	11.212.100,00	7.767.945,00	44,34
Beban Langganan Listrik	580.008.896,00	562.700.922,00	3,08
Beban Langganan Telepon	10.921.938,00	7.602.033,00	43,67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.313.000,00	7.200.000,00	-40,10
Beban Sewa	238.690.000,00	132.445.000,00	80,22
<b>Jumlah</b>	<b>12.517.132.991,00</b>	<b>6.034.068.482,00</b>	<b>107,44</b>

Merupakan entitas untuk mendukung baik kegiatan dan barang jasa konsumsi pelaksanaan operasional satuan kerja kelancaran kegiatan tahun anggaran 2021.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.417.903.324,00 dan Rp.1.981.926.859,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.158.919.475,00	1.158.085.028,00	0,07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	807.621.373,00	785.286.331,00	2,84
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	154.057.640,00	38.555.500,00	299,57
Beban Persediaan suku cadang	297.304.836,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.417.903.324,00</b>	<b>1.981.926.859,00</b>	<b>22,00</b>

Terjadi pemeliharaan seiring kegiatan berjalan untuk perawatan Aset atau mempertahankan kondisi Aset menjadi kondisi normal kembali untuk kegiatan 2021.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.9.093.878.466,00 dan Rp.2.516.370.670,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.905.687.390,00	2.351.539.420,00	23,85
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	5.916.780.324,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.700.000,00	29.800.000,00	254,70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	159.056.000,00	135.031.250,00	17,79
<b>Jumlah</b>	<b>9.093.878.466,00</b>	<b>2.516.370.670,00</b>	<b>261,39</b>

Merupakan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Jabatan untuk mendukung kegiatan Balai Besar Litbang Tahun Kegiatan 2021.

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.210.197.408,00 dan Rp.2.762.958.390,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	272.000,00	272.000,00	0,00
Beban Amortisasi Hak Cipta	73.934,00	73.934,00	0,00
Beban Amortisasi Software	1.590.067,00	1.590.067,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	566.499.574,00	711.656.896,00	-20,40
Beban Penyusutan Irigasi	1.010.676,00	1.516.014,00	-33,33
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	123.228.933,00	123.228.933,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.517.522.224,00	1.924.620.546,00	-21,15
<b>Jumlah</b>	<b>2.210.197.408,00</b>	<b>2.762.958.390,00</b>	<b>-20,01</b>

Merupakan catatan sistem sistematis suatu nilai aset suatu berdasar kurun waktu merupakan nilai perubahan dan amortasi satu merupakan manfaat nilai aset yang manfaat ekonomo untuk aset tak berwujud sehingga terjadi penurunan aset di tahun 2021.

#### D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-46.949.700,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	112.867.000,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	79.816.800,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.550.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	507,00	21.810.900,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>507,00</b>	<b>171.095.000,00</b>	<b>-100,00</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.60.667.904.101,00 dan Rp.76.509.767.403,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.-45.317.345.977,00 dan Rp.-24.584.932.662,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.45.125.618.656,00 dan Rp.8.743.069.360,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	44.270.682.414,00
Diterima dari Entitas Lain	-545.552.518,00
Transfer Masuk	133.266.450,00
Pengesahan Hibah Langsung	1.267.222.310,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.125.618.656,00</b>

**E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp.-545.552.518,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.44.270.682.414,00.

**E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.133.266.450,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018080199633656000KP	186.343.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018080199633656000KP	-53.076.550,00
<b>Jumlah</b>			<b>133.266.450,00</b>

**E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.267.222.310,00 dan Rp.422.704.703,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	International Center for Tropical Agriculture	Rupiah Murni	212.863.025,00
2.	Australian Center for International Agriculture Research	Rupiah Murni	621.850.017,00
3.	Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative	Rupiah Murni	422.705.703,00
<b>Jumlah Nilai Hibah</b>			<b>1.267.222.310,00</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.60.476.176.780,00 dan Rp.60.667.904.101,00.

#### F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

##### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kantor Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2021.

##### F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 06/Kpts/OT.160/1/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sedangkan Pejabat yang diberi kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM didasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 03/KU.410/I.8/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 04/KU.410/I.8/01/2015 tanggal 9 Januari 2015 menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada BBSDLP. Adapun rincian dari pejabat tersebut yaitu:

- a) Kuasa Pengguna Anggaran : Husnain, SP., MP., Ph.D
- b) Pejabat Penandatanganan SPM : Aris Dwi Saputra, SE
- c) Pejabat Pembuat Komitmen(APBN) : Wahyu Wahdini Marta SE., MM
- d) Pejabat Pembuat Komitmen(RPIK) : Eman Sulaeman, SP., M.Si
- e) Bendahara Penerimaan : Haryani, SE
- f) Bendahara Pengeluaran : Tedy Januar, SE
- g) Operator BMN : Teguh Mulyono, SM
- h) Operator SAK/SAIBA : Wiwit Winarto, Amd

## **1. Rekening Pemerintah**

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor untuk meminta persetujuan penggunaan Rekening Bank. Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara tertuang dalam surat Nomor : S.0050/WPB.12/KP.04/2008 tanggal 7 Januari 2008 atas Rekening Nomor : 0012-01-000138-305 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor. Sementara untuk rekening nomor: 133-00-9001331-9 di Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor Kapten Muslihat, yang selama ini digunakan untuk menampung kegiatan kerjasama ditutup. Penutupan rekening telah dilakukan pada 27 Februari 2008, dan saldo penutupan rekening sebesar Rp 3.366.551,- telah disetor ke Kas Umum Negara pada 9 Pebruari 2009. Surat Keterangan Penutupan Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri diterbitkan melalui Surat Nomor: 5.Sp.BKM/382/2010 tanggal 20 Desember 2010. Dalam rangka penertiban rekening pemerintah dimaksud, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah diaudit oleh Tim BPKP sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST-089/D1/02/2009 tanggal 29 Januari 2009. Audit dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2009. Semua saran sudah ditindaklanjuti dengan lengkap. Dan untuk rekening kerjasama HIBAH sampai tahun 2014 masih dibuka dan dengan posisi saldo per 31 Desember 2014 adalah Rp. 0,- pada rekening tersebut. Pada tanggal 9 maret 2015 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melakukan penutupan rekening Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika dengan Nomor Rekening : 0012.01.001868.30.1 atas nama ICCTF-BBSDLP yang selama ini digunakan untuk menampung kegiatan hibah Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengoptimalkan produktivitas tanaman. Penutupun rekening tersebut sesuai dengan keterangan Bank BRI Nomor : B.1728-KC-XIV/PEL/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 dengan saldo Rp 0,- Untuk pelaksanaan Kegiatan APBN 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 semua satuan kerja harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kembali. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kembali yang selama ini menggunakan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor Dewi Sartika dengan Nomor Rekening: 0012-01-000138-30-5. Pembukaan Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukaan Rekening dimaksud telah mendapatkan persetujuan kembali dari Menteri Keuanganc.q. Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bogor selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Surat Persetujuan Nomor : S- 1128/WPB.13/KP.023/2015 tanggal 10 April 2015, Dengan nomor rekening 001201000138305 dan nama rekening BPg 023 BBPP Sumberdaya Lahan Pertanian. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan Penerimaan Negara, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengajukan pembukaan rekening untuk bendahara penerimaan yang menampung kegiatan PNBPN. Rekening yang dimiliki oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S- 1435/WPB.13/KP.023/2015 tanggal 06 Mei 2015 adalah Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika: 0012-01-002710-30-7 dengan nama rekening BPN 023 BBPP Sumberdaya Lahan Pertanian.

**Sekarang Sudah Menggunakan Rekening Virtual dengan Eselon I.**

## **2. Kemitraan dengan pihak III**

### **1. Hibah**

Pada tahun 2018 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mendapatkan hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang tunai untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari *Research Council of Norway* tentang: *Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change* senilai NOK 637.500. Hibah kerjasama tersebut dilaksanakan selama 3 tahun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama Nomor 243789 dan nomor register 2AH9JM5A. sampai dengan sekarang masih berlangsung berkelanjutan.

### **2. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**

a. Pada tahun 2016 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

## **3. Sertifikat ISO 9001:2008**

Sejak 2010, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Kesiapan tersebut didukung dengan telah diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2008 dari PT Mutuagung Lestari, dengan Nomor Sertifikat: 10/QM/200 tanggal 1 Februari 2010. Dan pada Tahun Anggaran 2015 ini, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah berhasil mempertahankan Sertifikat tersebut setelah dilakukan Resertifikasi pada tanggal 25 s/d 26 Mei 2015. Sertifikat Registrasi dengan Nomor Sertifikat Baru:QMS/200 tanggal 3 April 2014 telah dipertahankan melalui *surveillance* ke-2 dengan surat keterangan Nomor:141.26/SKET- MUTU/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. Resertifikasi telah dilakukan kembali pada tahun 2016.

Resertifikasi berupa surveillance yang dilakukan pada 2016, dipergunakan sebagai dasar untuk memperpanjang sertifikasi. Ke depannya, PT MAL juga akan melakukan kegiatan audit ulang (re-sertifikasi) sebelum tanggal berakhirnya sertifikat.

Hasil dari pelaksanaan surveillance tersebut adalah bahwa ditemukan sejumlah ketidaksesuaian atas pelaksanaan sistem mutu pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian sebagai berikut: 6 (enam) temuan Ketidaksesuaian Minor, dan 3 (tiga) merupakan CFA (Comment For Action) atau saran. Temuan Minor tersebut adalah (1) Pengendalian Dokumen; (2) Manajemen; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Internal Audit; (5) Evaluasi; dan (6) Analisis Data. Sedangkan untuk temuan yang bersifat Saran (CFA) adalah: (1) Referensi Silang Identifikasi Proses dan Penerapannya, (2) Rekaman Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu dan Rencana Tindakan Selanjutnya, dan (3) Laporan Pemeriksaan Infrastruktur dan Lingkungan Kerja.

Setelah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian memperbaiki saran-saran dan menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan melalui telah diterbitkan Sertifikat Registrasi Nomor QMS/200 setelah PT Mutu Agung Lestari menyatakan bahwa semua finding yang diidentifikasi telah dinyatakan CLOSE OUT. Sertifikat tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 21 September 2018. Masa berlakunya sertifikat ini tidak sampai 3 (tiga) tahun, karena adanya perubahan Sistem Manajemen Mutu dari ISO 9001:20087 menjadi ISO 9001:2015. Masa transisi diberikan maksimal sampai dengan 21 September 2018.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Registrasi Nomor QMS/200 tersebut, PT Mutu Agung Lestari menyatakan bahwa Sertifikat ISO 9001:2008 Nomor QMS/200 dipertahankan dengan ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian berhak mendapatkan Logo Mutu dan Logo Sertifikasi secara elektronik, berhak mendapatkan Pedoman Penggunaan Logo Mutu dan Logo Sertifikasi sebagai dasar dalam penggunaan logo untuk media publikasi dan literatur kantor, kertas surat, brosur, kartu nama, poster, spanduk, kalender, media elektronik, website, perlengkapan display, dan kendaraan dinas Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian.

#### **4. DAMPAK COVID-19 TERHADAP SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun telah berdampak pada banyak sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi. Berbagai sektor terdampak oleh pandemi, baik swasta maupun pemerintahan, tidak terkecuali Satuan Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Pandemi Covid-19 telah memaksa satuan kerja untuk menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) untuk sebagian pegawainya. Adanya pembatasan mobilitas juga cukup berdampak pada kegiatan penelitian, mengingat sebagian besar kegiatan penelitian satuan kerja dilakukan diluar daerah. Kegiatan-kegiatan penelitian yang telah direncanakan sebelumnya harus tertunda karena pandemic covid-19. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut tentunya memberikan dampak bagi kinerja satuan kerja, Namun dengan tindakan antisipatif serta optimalisasi kegiatan yang tepat, kinerja Satuan Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian ditahun tahun sebelumnya masih mampu dipertahankan.

Hingga akhir tahun 2021, tingkat serapan anggaran satuan kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sebesar 97,53% atau senilai Rp. 45.528.101.159,-.

#### 5. Alokasi dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah mendesain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pertanian ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kegiatan-kegiatan Riset Dan Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menghasilkan teknologi sumberdaya lahan pertanian yang didiseminasikan kepada petani untuk meningkatkan kapasitas pertanian sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 26.950.000.000, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 26.237.257.825,- atau sebesar 97,36% hingga 31 Desember 2021. Rincian realisasi belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebagai berikut:

No	MAK	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	700.000.000	688.276.000	98,33%
2	522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID 19	2.212.400.000	1.761.317.327	79,61%
3	521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	4.879.985.000	4.756.690.079	97,47%
4	521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-19	13.108.215.000	13.004.998.095	99,21%

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2021

5	524115	Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	5.939.400.000	5.916.780.324	99,62%
6	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19	110.000.000	109.196.000	99,27%
<b>TOTAL</b>			<b>26.950.000.000</b>	<b>26.237.257.825</b>	<b>97.36%</b>

No	MAK	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	226.600.000	210.315.546	80,25%
2	522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID 19	79.101.000	77.705.110	96,43%
<b>TOTAL</b>			<b>305.701.000</b>	<b>288.020.656</b>	<b>94.22</b>